

**PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA RANOKETANG ATAS,
KECAMATAN TOULUAAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

EUNIKE KEZIA SUMANGKUT

MASJE S. PANGKEY

GUSTAAF B. TAMPI

Email: eunikekeziasumangkut@gmail.com

Abstract: Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) or better known as Home Repair is one of the government programs to help people have a decent house as well as a means for social welfare development. This home renovation program has been implemented in many regions in Indonesia. The aim of the researcher in conducting this research was to find out how the Home Improvement Program was implemented in Ranoketang Atas Village. In this study, the researcher focused on the problems found in the field, namely how the implementation of the Home Improvement Program in Ranoketang Atas Village was in accordance with the factors that supported the implementation. According to Ksumanegara (2010), there are four factors that play an important role in the successful implementation of a policy. These factors are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative method. Data is grouped to make it easier to filter which data is needed or not. After grouping the data, the researcher describes it in text form, so that it is better understood, after that the writer draws conclusions from the data so that it can answer the main problem of the research. The result of this research is that the factors that play an important role in the successful achievement of a policy have been fulfilled. Thus, the implementation of the house renovation program in Ranoketang Atas village has gone well. This research is expected to provide benefits for the development of Social Sciences and can be used as a reference for the Ranoketang Atas village government to maintain its performance in the house renov.

Keywords: Implementation, Program, Home Improvement, Communication, ation program and improve what is needed for the continuity of the program Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

PENDAHULUAN

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah Bedah Rumah merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak sekaligus sebagai sarana untuk pembangunan kesejahteraan sosial. Program Bedah Rumah ini sudah dijalankan di banyak daerah di Indonesia.

Desa Ranoketang Atas adalah salah satu desa di Kecamatan Touluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara berupaya mensejahterakan warganya dengan menyelenggarakan program bedah rumah.

Sekitar Rp. 60.000.000 (60 juta) dianggarkan untuk program bedah rumah tersebut setiap tahunnya. Setiap kepala keluarga yang termasuk dalam program ini menerima Rp. 1.500.000 (1,5 juta) sampai Rp. 5.000.000 (5 juta) yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan seperti semen, cat, seng, dan lain sebagainya. Variasi jumlah maupun jenis barang yang diterima dikarenakan kebutuhan setiap rumah berbeda. Misalnya saja, sebuah keluarga belum memiliki rumah yang layak atau sedang dalam proses membangun rumah maka keluarga tersebut akan menerima bantuan bedah rumah berupa bahan bangunan seperti semen dan seng. Jika sudah selesai membangun rumah namun rumahnya belum dicat maka akan menerima bantuan berupa cat. Atau bahkan jika keluarga tersebut sudah memiliki rumah yang layak namun belum memiliki kamar mandi dan WC yang layak maka akan diberi bantuan untuk membuat kamar mandi dan WC yang layak. Oleh karena itu, meskipun program ini sudah biasa disebut Bedah Rumah, namun menurut Kepala Desa Ranoketang Atas program bedah rumah ini lebih cocok disebut dengan Rehabilitas Rumah.

Program bedah rumah di Desa Ranoketang Atas ini sudah berjalan sejak

tahun 2017. Hingga akhir tahun 2019, sudah ada sekitar 90 keluarga yang menerima program bantuan bedah rumah, sedangkan pada tahun 2019 ada sekitar \pm 12 keluarga yang menerima program tersebut. Pemerintah desa Ranoketang Atas hingga saat ini terus berupaya agar semakin banyak masyarakat yang menerima program bantuan bedah rumah. Kepala Desa setempat mengatakan jika hanya satu orang yang menerima bantuan tersebut maka akan membuat masyarakat yang lain iri.

Pemerintah Desa Ranoketang Atas berupaya meningkatkan kualitas program bedah rumah di desa tersebut. Peningkatan kualitas ini sangat penting dan perlu diperhatikan agar program bedah rumah menjadi lebih berjalan maksimal serta tepat sasaran. Namun dari pra-survey yang dilakukan oleh penulis, sepertinya kualitas program bedah rumah di Desa Ranoketang Atas ini masih belum meningkat. Hal itu terbukti dari masih banyaknya pemberian program bantuan bedah rumah yang tidak atau kurang tepat sasaran. Masyarakat pun banyak yang berharap agar pemerintah lebih selektif dalam memberikan program bantuan bedah rumah agar penerima bantuan tersebut lebih tepat sasaran, dalam artian penerima bantuan haruslah masyarakat yang benar-benar belum memiliki rumah yang layak. Masalah lain yang ditemui di lapangan adalah perihal berkas-berkas persyaratan untuk menerima bantuan bedah rumah. Umumnya masyarakat penerima bantuan akan dimintai berkas-berkas tertentu oleh pihak yang berwenang namun dalam hal ini ada masyarakat yang tidak dimintai berkas sama sekali. Ada juga masyarakat yang sudah pernah menerima bantuan bedah rumah namun meminta lagi dan kembali mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian tentang

“Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Desa Ranoketang Atas”.

s

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Melda Trensa Leviana Sitorus, Florence Lengkong, dan Novva Plangiten dengan judul penelitian Pengaruh Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu berusaha menjawab besaran pengaruh variabel implementasi terhadap kesejahteraan. Teknik pengumpulan data dengan memberikan angket pada penerima bantuan. Pengujian analisis menggunakan uji Validitas, uji Reabilitas, uji Regresi Linear Sederhana, dan uji Korelasi Product Moment. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.
2. Penelitian oleh Livander Cornelius Likuyang, Gustaaf Tampi, dan Rully Mambo dengan judul penelitian Efektivitas Program Bedah Rumah pada tahun 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya dan belum meningkatnya kualitas program bedah rumah di desa Ranoketang Atas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah terkumpul, data dianalisis dengan cara menelaah dan mereduksi data yang bersifat deskriptif, kemudian dikategorisasikan untuk diperiksa dan ditafsirkan. Hasil analisis data tersebut diuraikan menggunakan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang

diperluas. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas program bedah rumah di desa Ranoketang atas belum terlaksana dengan baik dan masih memerlukan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban para informan. Masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan program bedah rumah yang harus diperbaiki. Efektivitas program bedah rumah yang ada di Desa Ranoketang Atas belum terlaksana dengan baik dan harus ada perbaikan pada program tersebut, khususnya dalam proses pengerjaan yang tidak selesai, anggaran yang disalurkan tidak diketahui masyarakat, mekanisme serta kriteria yang belum memiliki kejelasan, dan koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD yang belum berjalan baik.

3. Imanuel Meyer, Florence Lengkong, dan Alden Laloma dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program BPS di Minahasa Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah terkumpul, data dianalisis dengan cara menelaah dan mereduksi data yang bersifat deskriptif, kemudian dikategorisasikan untuk diperiksa dan ditafsirkan. Hasil analisis data tersebut diuraikan menggunakan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan BPS di Minahasa Selatan belum cukup baik dilihat dari masalah-masalah yang masih terjadi dalam dimensi-dimensi implementasi kebijakan. Masalah-masalah tersebut

antara lain adalah pihak dinas memberikan kepercayaan penuh mengenai sistem rekrutmen calon penerima bantuan BSPS pada pemerintah desa namun sistem rekrutmen yang dilakukan pemerintah desa tersebut terkesan tertutup dan terbang pilih, sumber daya yang mendukung kebijakan publik sejauh ini belum terlalu baik, kinerja dinas dalam mensosialisasikan kebijakan BSPS belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan ini dan pengetahuan para pegawai mengenai kebijakan ini pun masih sangat minim, masih perlu adanya peningkatan kerjasama antara organisasi, dan masih perlunya peningkatan disiplin kerja, disiplin waktu, etika birokrasi serta moralitas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait dengan kebijakan BSPS.

4. Roki Taliawo, Patar Rumapea, dan Salmin Dengo dengan judul penelitian *Implementation Of Building Support Program For Self-Help Housing Bedah Home For People In Buo Village, South Loloda Sub-District, Halmahera Barat District, North Maluku Province* pada tahun 2018.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang ditemukan di pelaksanaan BSPS di Desa Buo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah terkumpul, data dianalisis dengan cara menelaah dan mereduksi data yang bersifat deskriptif, kemudian dikategorisasikan untuk diperiksa dan ditafsirkan. Hasil analisis data tersebut diuraikan menggunakan kata-kata yang disusun

dalam bentuk teks yang diperluas. Hasil penelitian ini adalah bahwa daya tanggap pegawai pemerintah Desa Buo masih lambat, adanya biaya tambahan di luar biaya normal, dan adanya penyalahgunaan wewenang namun efektivitas dan efisiensinya sudah baik.

5. Yuni Tampomuri, Arie Rorong, dan Very Londa dengan judul penelitian *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara* pada tahun 2014.

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan kebutuhan dalam membangun desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pelaksanaan belanja pendapatan desa untuk mendukung pembangunan Desa Betelen sehingga data dan informasi tentang kendala pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk mendukung pembangunan desa di Desa Betelen terlaksana.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, informan sederhana yang dipilih secara *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel dengan sumber data tertentu (Sugiono, 2008). Informan kuncinya adalah dipilih dari lima Jaga (lima wilayah) di desa Betelen yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua badan permusyawaratan desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan empat komunitas. Sebanyak 15 informan dipilih dan diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas manajerial dalam

pengelolaan keuangan aparat desa masih kurang, transparansi pengelolaan keuangan belum sepenuhnya terlihat, masih ada yang membingungkan dalam pengelolaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada perbaikan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya maksimal.

Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, perencanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan perencanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (dalam Usman, 2002).

Van Meter dan Van Horn juga mengatakan bahwa prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut (dalam Winarno, 2002). Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan enam variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumber daya.
- c. Karakteristik agen pelaksana.
- d. Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana.
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
- f. Lingkungan ekonomi, social dan politik.

Dalam proses pelaksanaan, Abdullah (2000) mengemukakan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
- b. Kelompok sasaran (*target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan).
- c. Unsur pelaksana atau implementor, baik organisasi maupun perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Edward III (1980), ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan (dalam Kusumanegara, 2010, dan Nugroho, 2010), sebagai berikut.

- a. Komunikasi, yaitu bahwa setiap kebijakan atau program akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran (*target group*). Implementasi dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dari perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Dalam komunikasi juga terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel

komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut.

- 1.) Transmisi
 - 2.) Kejelasan
 - 3.) Konsistensi
- b. Sumber daya, yaitu bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atau anggaran untuk sebuah kebijakan atau program. Sumber daya yang penting meliputi staff dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber daya memiliki beberapa elemen penting, yaitu sebagai berikut.
 - 1.) Staf
 - 2.) Informasi
 - 3.) Wewenang
 - 4.) Fasilitas

c. Disposisi, yaitu karakteristik yang menempel erat pada seorang implementor suatu kebijakan atau program. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya di luar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam disposisi, yaitu sebagai berikut.
 - 1.) Pengangkatan birokrat.
 - 2.) Insentif

d. Struktur birokrasi, yaitu bahwa struktur birokrasi merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Dalam struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang

dapat mendongkrak kinerja birokrasi, yaitu sebagai berikut.

- 1.) Melakukan Standart Operating Procedures (SOP)
- 2.) Melakukan fragmentasi

Konsep Bedah Rumah

Bedah Rumah adalah salah satu program yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN kabupaten, provinsi dan pusat, pemerintah kabupaten provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10 persen untuk alokasi dana desa. Dengan alokasi dana sebesar 10 persen ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Dengan terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10 persen akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Dengan dana itulah program bedah rumah dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaan APBD memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Dalam pasal 12, 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah, tentang penyelenggaraan Bantuan Program Bedah Rumah yaitu meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengusulan lokasi bantuan program bedah rumah;
- b. Penetapan lokasi;
- c. Penyiapan masyarakat;
- d. Penetapan calon penerima bantuan program bedah rumah/BSPS;
- e. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BPBS/Bedah rumah dalam bentuk uang;

- f. Pengadaan dan penyerahan BSPS/bedah rumah bentuk barang; dan
- g. Pelaporan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Prasarana lingkungan. BABII, kriteria dan persyaratan, pasal 3 yaitu:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan kondisi keselamatan penghuni rumah;
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/ lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dankakus, dan/atau;
- e. Luas tanah kurang dari 7,2 meter per segi.

Sedangkan untuk persyaratan calon penerima bantuan program bedah rumah pada pasal 4, Permensos No 20 tahun 2017 yaitu:

- a. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin;
- b. Belum pernah mendapatkan program bedah rumah sebelumnya;
- c. Memiliki kartu identitas atau kartu keluarga; dan
- d. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/akta atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah.

Menurut Afifudin (2012), bedah rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah dan bagian dari Pembangunan Nasional, dimana Tujuan Pembangunan Nasional merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu (Moleong 2006). Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan di analisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian dilapangan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

- a. Data primer
- b. Data sekunder

Fokus Penelitian

Menurut Kusumanegara (2010), ada empat Faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standart Operating Procedure), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini tidak sulit mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintah desa Ranoketang Atas selaku penyelenggara program bedah rumah dan masyarakat penerima program bantuan bedah rumah.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Kepustakaan

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Reduksi data.
- c. Penyajian data.
- d. Tahap akhir yaitu menarik kesimpulan.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu sebagai berikut.

- a. Derajat kepercayaan
- b. Keteralihan
- c. Kebergantungan
- d. Kepastian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana fokus penelitian ini yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang berperan penting dalam pelaksanaan yang menurut Kusumanegara (2010) terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Aspek-aspek tersebut selanjutnya akan dibahas satu per satu.

Komunikasi

Komunikasi mengenai program bedah rumah di desa Ranoketang Atas berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa yang telah menyampaikan program ini kepada masyarakat dalam rapat bersama pemerintah dan masyarakat desa. Informasi mengenai program, termasuk jumlah anggaran beserta bentuk bantuan yang akan diberikan sudah disampaikan dengan jelas kepada masyarakat penerima bantuan sehingga mereka menerima informasi tersebut dengan baik. Informasi yang disampaikan juga konsisten. Hal tersebut terbukti dengan samanya informasi mengenai program yang diketahui semua masyarakat walaupun mereka menerima bantuan dalam waktu yang berbeda. Bentuk bantuan yang diterima semua penerima bantuan juga sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, yaitu hanya sesuai kebutuhan dengan jumlah terbatas agar lebih banyak masyarakat yang dapat menerima bantuan.

Sumber Daya

Sumber daya dalam program bedah rumah, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sudah memadai. Sumber daya manusia dalam program bedah rumah ini terpenuhi dan dapat dilihat dari selain dari pemerintah sendiri yang melaksanakan program, ada juga tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengerjakan atau memasang bantuan material yang diberikan, dalam hal ini pemerintah juga memberdayakan tenaga kerja tersebut. Sumber daya finansial dalam program ini juga terpenuhi karena anggaran untuk program ini tersedia namun besarnya anggaran untuk setiap penerima tidak tetap karena disesuaikan dengan besarnya anggaran yang tersedia. Bantuan ini juga disalurkan secara bertahap, tidak secara serempak.

Disposisi

Para pelaksana program bedah rumah di desa Ranoketang atas memiliki sikap dan komitmen yang dijunjung dalam melaksanakan program. Sikap dan komitmen tersebut adalah membantu dan meringankan beban masyarakat sebagai upaya untuk meneruskan program-program pemerintah pusat dalam hal pengentasan kemiskinan.

Struktur Birokrasi

Kinerja birokrasi dalam program bedah rumah di desa Ranoketang Atas sudah maksimal karena program sudah berjalan sesuai dengan Standart Operating Procedures. Hal itu dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai oleh program ini yaitu banyaknya masyarakat yang telah dibantu untuk melakukan peningkatan pada rumah atau tempat tinggalnya dan kepuasan masyarakat terhadap program ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi mengenai program bedah rumah di desa Ranoketang Atas berjalan dengan baik. Informasi mengenai program, termasuk jumlah anggaran beserta bentuk bantuan yang akan diberikan sudah disampaikan dengan jelas kepada masyarakat penerima bantuan sehingga mereka menerima informasi tersebut dengan baik. Informasi yang disampaikan juga konsisten.
2. Sumber daya dalam program bedah rumah, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sudah memadai. Sumber daya finansial dalam program ini juga terpenuhi karena

anggaran untuk program ini tersedia namun besarnya anggaran untuk setiap penerima tidak tetap karena disesuaikan dengan besarnya anggaran yang tersedia. Bantuan ini juga disalurkan secara bertahap, tidak secara serempak.

3. Para pelaksana program bedah rumah di desa Ranoketang atas memiliki sikap dan komitmen yang dijunjung dalam melaksanakan program. Sikap dan komitmen tersebut adalah membantu dan meringankan beban masyarakat sebagai upaya untuk meneruskan program-program pemerintah pusat dalam hal pengentasan kemiskinan.
4. Kinerja birokrasi dalam program bedah rumah di desa Ranoketang Atas sudah maksimal karena program sudah berjalan sesuai dengan Standart Operating Procedures.

Saran

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Ranoketang Atas diharapkan terus menjaga komunikasi dengan masyarakat di desa. Agar komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dapat terus berjalan baik, pemerintah harus terus mensosialisasikan informasi mengenai program dan konsisten terhadap informasi tersebut.
2. Agar program bedah rumah di desa Ranoketang atas terus berjalan lancar dan tidak tersendat, pemerintah desa sebaiknya memastikan semua sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, tetap tersedia dan memadai.
3. Agar aparat pelaksana program bedah rumah terus mempertahankan sikap dan komitmennya, pemerintah diharapkan memperhatikan pengangkatan birokrat dan pemberian insentif. Hal tersebut

bertujuan agar aparat pelaksana program terus termotivasi dalam tugasnya melayani masyarakat dengan menyalurkan program bantuan bedah rumah.

4. Kinerja birokrasi dalam melaksanakan program bedah rumah sudah maksimal namun sebaiknya pemerintah desa terus menjalankan program bedah rumah di desa Ranoketang Atas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan dan semakin meningkat pula kepuasan masyarakat terhadap program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, S. 2000. *Budaya Birokrasi Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika.
- Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc.
- Kusumanegara, S. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2010. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

Skripsi & Jurnal

- Sitorus, M. T. L., Lengkong, F., dan Plangiten, N. (2019). Pengaruh Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

- Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (79) : 6.
- Likuayang, L. C., Tampi, G., dan Mambo, R. (2019). Efektivitas Program Bedah Rumah. *Jurnal Administrasi Publik*. 5 (82) : 5.
- Meyer, I., Lengkong, F., dan Laloma, A. (2018). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. 4 (54) : 9.
- Taliawo, R., Rumapea, P., dan Dengo, S. (2018). Implementation Of Building Support Program For Self-Help Housing Bedah Home For People In Buo Village, South Loloda Sub-District, Halmahera Barat District, North Maluku Province. *Jurnal Administrasi Publik*. 4 (60) : 4.
- Tampomuri, Y., Rorong, A., dan Londa, V. (2014). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (4) : 2.
- 7/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Permendesa PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Sumber Lainnya

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Prasarana Lingkungan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
- Keputusan Kementrian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat No